

PENYIMPANGAN MAKSIM KESOPANAN PADA POSTINGAN POLITIK DI SOSIAL MEDIA

Giyatmi

Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo
giyatmi85jimmy@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak. Suhu politik Indonesia yang semakin memanas telah memicu munculnya tulisan pada postingan yang terkesan arogan, vulgar, saling menyerang serta saling menjatuhkan di akun social media seperti Facebook, Twitter. Bahasa dalam status tersebut tidak mencerminkan kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa terkait dengan usaha peserta tutur untuk menghindari konflik dalam proses komunikasi. Ada beberapa teori terkait kesopanan; Lakoff (1973) dengan tiga kriteria kesopanan meliputi formalitas, ketidaktegasan, serta persamaan. Brown dan Levinson (1978) membedakan kesopanan dalam muka positif serta muka negatif. Teori kesopanan dari Leech (1983) yang terkenal dengan Prinsip Kesopanan yang tertuang dalam 6 maksim yaitu maksim kebijaksanaan (*tact*), maksim penerimaan (*generosity*), maksim kemurahan (*approbation*), maksim kerendahan hati (*modesty*), maksim persetujuan (*agreement*), serta maksim simpati (*sympathy*). Dari pengamatan terhadap beberapa contoh postingan di akun social media seperti Facebook, Twitter terdapat banyak penyimpangan terhadap prinsip kesopanan. Penyimpangan maksim kebijaksanaan terjadi apabila tuturan menimbulkan kerugian bagi peserta tutur seperti menuduh, meragukan kemampuan, serta menyalahkan orang lain. Penyimpangan maksim penerimaan terjadi apabila tuturan nampak menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya seperti mencari simpati namun dengan cara yang tidak selayaknya. Penyimpangan maksim kemurahan terjadi dalam bentuk cemoohan serta hinaan melalui pemberian nama panggilan, menyamakan dengan sesuatu hal yang dianggap kurang bagus. Penyimpangan maksim kerendahan hati terjadi dengan menyombongkan diri atau kelompoknya. Penyimpangan maksim persetujuan terjadi saat peserta tutur saling bertentangan, saling menantang, saling membandingkan. Penyimpangan maksim simpati terjadi apabila peserta tutur dengan sengaja menunjukkan antipati terhadap orang lain dan tidak menghargai keberhasilan orang lain. Meskipun komunikasi semakin maju namun tidak sepatasannya peserta tutur meninggalkan prinsip kesopanan dalam berkomunikasi.

Kata Kunci: Kesopanan, Prinsip Kesopanan, Skala Kesopanan, Penyimpangan Prinsip Kesopanan

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir ini sepertinya menjadi tahun yang panas di dunia politik Indonesia. Beberapa peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan politik seperti pemilihan kepala daerah serta pemilihan presiden telah menaikkan suhu politik di Indonesia. Tahun panas ini memicu terjadinya perang komentar serta statement dari individu maupun kelompok yang saling berlawanan di beberapa sosial media. Banyak komentar yang sifatnya saling menyerang serta menjatuhkan pihak tertentu, banyak berita hoax yang beredar, bermunculan ujaran kebencian (*hate speech*). Komentar-komentar tersebut tak seharusnya muncul selama proses komunikasi secara langsung maupun tidak langsung karena komentar tersebut sudah tentu menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Banyak komentar yang telah menyimpang dari salah satu prinsip komunikasi yaitu prinsip kesopanan. Berikut beberapa postingan terkait politik yang ditemukan di sosial media:



Ketiga postingan di sosial media tersebut jelas mengandung hinaan yang ditujukan untuk merugikan pihak-pihak tertentu. Bentuk hinaan tersebut muncul dengan pemberian nama julukan yang merujuk pada pihak tertentu seperti Jokower, Cebonger, Bong, Ahoker, Bani Serbet serta Bani Taplak. Sementara postingan yang terakhir ditujukan kepada Prabowo Subiyanto sebagai capres yang memang memiliki hobi memelihara kuda. Bentuk hinaan dalam postingan tersebut merupakan tanda bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap prinsip kesopanan dalam sebuah proses komunikasi. Prinsip kesopanan dalam berbahasa tidak terkait dengan memberikan tempat duduk kepada perempuan yang sedang berdiri di dalam alat transportasi seperti kereta api maupun bis. Prinsip kesopanan dalam berbahasa lebih merujuk pada kesadaran kita selaku peserta komunikasi akan keberadaan lawan bicara kita.

Dalam berkomunikasi paling tidak seseorang harus memahami dua prinsip komunikasi, yaitu prinsip kerjasama (*Cooperative Principle*) serta prinsip kesopanan (*Politeness Principle*). Prinsip kerjasama diperlukan supaya proses komunikasi dapat dipahami oleh peserta komunikasi. Prinsip kerjasama memungkinkan seorang peserta percakapan untuk berkomunikasi dengan asumsi bahwa peserta yang lain bersedia bekerja sama. Dalam hal ini prinsip kerjasama berfungsi mengatur apa yang dikatakan oleh peserta percakapan sehingga tuturan dapat menyumbang kepada tujuan ilokusi atau tujuan wacana.

Menurut Nadar (2009; 24), prinsip kerjasama memiliki 4 maksim yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim hubungan serta maksim cara. Inti dari prinsip kerjasama adalah bahwa pada saat berkomunikasi, peserta komunikasi sepatutnya berbicara dengan singkat, jelas benar, mudah dipahami serta urut. Saat peserta komunikasi mematuhi empat maksim tersebut, maka akan didapatkan percakapan yang baik, namun hal ini belum tentu menjadi jaminan bahwa percakapan tersebut secara otomatis sopan. Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa kalau mementingkan kesantunan, maka ada kemungkinan prinsip kerjasama akan dilanggar. Sebagai contoh kalau hendak menyuruh orang lain, maka benar dan sah saja kalau seseorang menyuruh dengan cara langsung dengan menggunakan kalimat perintah seperti *Ambilkan buku itu!* Namun seperti ujaran yang demikian memberi kesan tidak sopan apalagi jika diucapkan kepada orang yang lebih tua. Dalam hal ini prinsip kesopanan yang dikenalkan oleh Leech memainkan perannya dengan memilih ujaran perintah namun secara tidak langsung seperti: *Bisakah saya mohon kesediaan anda untuk mengambil buku itu?* Prinsip kesopanan berperan menjaga keseimbangan sosial dan keramahan hubungan, karena hanya dengan hubungan yang demikian kita dapat mengharapkan bahwa peserta yang lain akan bekerja sama.

Dalam tulisan kali ini, penulis akan membahas penyimpangan prinsip kesopanan dalam postingan politik di sosial media beberapa waktu terakhir ini. Penulis akan mengambil beberapa contoh postingan dari beberapa akun di sosial media, seperti Facebook serta Twitter.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesopanan Berbahasa

Kesopanan dalam berbahasa tidaklah terkait dengan sikap memberikan tempat duduk kepada perempuan hamil yang berdiri di dalam bus maupun kereta. Kesopanan dalam berbahasa lebih berhubungan dengan kesadaran kita terhadap keberadaan lawan bicara selama proses komunikasi terjadi. Kesopanan adalah suatu sistem hubungan antar manusia yang diciptakan untuk mempermudah hubungan dengan meminimalkan potensi konflik dan perlawanan yang melekat dalam segala kegiatan manusia (Yule, 2006; 183). Sehingga dengan demikian kesantunan berbahasa lebih terkait dengan seberapa jauh usaha kita untuk menghindari konflik pada saat proses komunikasi berlangsung.

Kesopanan berbahasa dapat diwujudkan dengan penggunaan bentuk tidak langsung terutama untuk ungkapan yang bersifat memerintah (Yule, 2006; 183). Kesopanan dalam berbahasa dapat diwujudkan melalui beberapa cara misalnya menghindari penggunaan ungkapan yang memiliki unsur penghinaan terhadap lawan bicara, ungkapan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap lawan bicara, ungkapan yang menunjukkan rasa ketidakhormatan terhadap lawan bicara. Chaer (2010; 109-113) mengelompokkan kesantunan berbahasa dalam dua kelompok. Kelompok pertama meliputi hal-hal yang dilarang seperti; tidak mempermalukan lawan bicara, tidak menyombongkan diri, tidak menghina, tidak menunjukkan rasa senang terhadap kemandirian orang lain, jangan menunjukkan rasa tidak setuju dengan lawan bicara, jangan menggunakan kalimat langsung untuk menyuruh/menolak permintaan, serta tidak memaksakan kehendak kepada lawan bicara.

Sementara itu kelompok kedua adalah hal-hal yang dilakukan yang meliputi membuat lawan tutur merasa senang, memberi pujian kepada lawan tutur, menunjukkan persetujuan kepada lawan tutur, bersikap rendah terhadap lawan tutur, menunjukkan simpati kepada lawan tutur, menggunakan kosakata yang secara sosial budaya lebih sopan dan santun, menggunakan kata sapaan dan kata ganti yang sesuai dengan identitas sosial penutur dan lawan tutur, menggunakan kata maaf, menggunakan bentuk tidak langsung dalam menyuruh, menggunakan kata mohon (Chaer, 2010; 113-118).

Kehadiran seseorang di dalam masyarakat muncul karena interaksi individu dengan individu. Interaksi antara individu tersebut didasarkan pada norma dan etika sopan santun yang berlaku dalam budaya masyarakat. Kesopanan, kelembutan suatu kata atau frasa yang terdengar tidak sopan, tidak disetujui akan digantikan dengan kata atau frasa lain yang bisa dan dimengerti secara baik oleh penutur maupun petutur (Suryono, 2010: 119 – 133). Kesopanan berbahasa

dipengaruhi oleh banyak hal. Chaer (2010; 73) menyebutkan bahwa tuturan yang santun berkaitan dengan bahasa yang digunakan. Bahasa yang santun dipengaruhi oleh topik tuturan, konteks situasi tutur, jarak hubungan sosial antara penutur dan lawan tutur serta tujuan pertuturan. Topik tuturan dapat bervariasi di masyarakat. Semua hal di masyarakat dapat dijadikan topik tuturan, namun ada topik yang layak dibicarakan dan ada pula topik yang tidak layak dibicarakan. Sebagai contoh topik yang kurang layak adalah soal usia bagi orang-orang tertentu terutama bagi wanita dewasa. Konteks situasi meliputi tempat, waktu serta suasana psikologis (suasana senang/sedih). Kedekatan atau jarak hubungan sosial antar peserta tutur juga mempengaruhi kesopanan dalam berbahasa.

Teori Kesantunan

Ada beberapa ahli yang menulis hal terkait dengan teori kesantunan atau kesopanan. Beberapa diantaranya Lakoff (1973), Brown and Levinson (1978), Leech (1983). Menurut Lakoff dalam Chaer (2010; 46), suatu tuturan dianggap sopan apabila memenuhi tiga kriteria kaidah kesantunan yang meliputi formalitas (*formality*), ketidaktegasan (*hesitancy*), dan persamaan atau kesekawanan (*equality of camaraderie*). Dalam formalitas seorang penutur tidak boleh memaksakan kehendak serta tidak boleh angkuh (*aloof*), ketidaktegasan dalam hal ini dimaknai sebagai pemberian kebebasan bagi lawan tutur untuk menentukan pilihan (*option*), sedangkan persamaan dimaknai bahwa kedudukan antara penutur dan lawan tutur adalah sama.

Sementara dari Brown dan Levinson, kesopanan dalam berbahasa berkaitan dengan muka (*face*). Tentu saja muka (*face*) di sini bukanlah muka dalam arti yang harfiah. Muka (*face*) dalam hal ini dibedakan menjadi muka negatif (*negative face*) dan muka positif (*positive face*). Penggunaan istilah positif dan negatif pada kasus ini bukan bermakna bagus dan tidak bagus. Muka negatif merujuk pada keinginan orang yang ingin selalu diberi kebebasan dari keharusan mengerjakan sesuatu. Sehingga ketika lawan tutur menyuruh penutur melakukan sesuatu dalam tindak tutur direktif, hal ini berarti bahwa penutur telah menyebabkan lawan tutur kehilangan muka negatif. Misal ketika penutur mengatakan: Bisakah anda membuka pintu itu? Maka dalam hal ini si lawan tutur akan merespon ujaran tersebut dengan cara melaksanakan tindakan membuka pintu. Hal demikian dimaknai bahwa penutur telah melanggar hak kebebasan lawan tutur. Sementara itu muka positif (*positive face*) merujuk pada suatu keinginan agar penutur dihargai, dihormati serta dipuji oleh lawan tuturnya. Dalam hal ini kritik, hinaan, celaan dapat menyebabkan seseorang kehilangan muka positif.

Ahli bahasa lainnya yang membahas tentang kesopanan adalah Geoffrey Leech (1983). Leech terkenal dengan teori Prinsip Kesopanan. Leech (1993; 206) menyebutkan bahwa prinsip Kesopanan terdiri dari 6 maksim, yaitu maksim kebijaksanaan (*tact maxim*), maksim penerimaan (*generosity maxim*), maksim kemurahan (*approbation maxim*), maksim kerendahan hati (*modesty maxim*), maksim persetujuan (*agreement maxim*), serta maksim simpati (*sympathy maxim*). Prinsip kesantunan atau kesopanan yang sampai saat ini dianggap paling lengkap, paling mapan dan relative paling komprehensif adalah Prinsip Kesopanan yang dirumuskan oleh Leech (Rahardi, 2005; 59).

Maksim kebijaksanaan (*tact maxim*) beranggapan bahwa peserta tutur harus meminimalkan kerugian bagi orang lain serta memaksimalkan keuntungan untuk orang lain. Maksim keder-mawanan (*generosity maxim*) menghendaki peserta tutur untuk memaksimalkan kerugian bagi diri sendiri serta meminimalkan keuntungan bagi diri sendiri. Maksim kemurahan (*approbation maxim*) menginginkan bahwa setiap peserta tutur untuk memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain serta meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain. Maksim kerendahan hati (*modesty maxim*) beranggapan bahwa setiap peserta tutur untuk memaksimalkan ketidak-hormatan pada diri sendiri serta meminimalkan rasa hormat kepada diri sendiri. Maksim persetujuan/kecocokan menginginkan agar setiap peserta tutur (penutur dan lawan tutur) selalu memaksimalkan kesetujuan serta meminimalkan ketidaksetujuan di antara mereka. Sementara itu

maksim kesimpatian (*sympathy maxim*) mengharuskan semua peserta tutur untuk memaksimalkan rasa simpati dan meminimalkan rasa anti pati kepada lawan tuturnya (Leech, 1993; 206-207)

Skala Kesantunan

Skala kesantunan adalah rentangan tingkatan untuk menentukan kesantunan suatu tuturan. (Rustono, 1999:78). Ada tiga jenis skala pengukuran peringkat kesantunan yang sampai saat ini banyak digunakan dalam penelitian kesantunan, yaitu skala kesantunan dari Leech, Lakoff, serta Brown dan Levinson (Rahardi, 2005; 66). Lakoff dalam Rahardi (2005; 70) menjabarkan skala kesantunan dalam tiga skala yaitu skala formalitas (*formality scale*), skala ketidaktegasan (*hesitancy scale*), serta skala kesamaan (*equality scale*).

Dalam skala formalitas ditegaskan bahwa kesopanan suatu tuturan diukur dari kesan kenyamanan peserta tutur, yang timbul karena ketidakadaan pemaksaan serta keangkuhan selama proses komunikasi berlangsung. Skala ketidaktegasan (*hesitancy scale*) ditunjukkan dengan kenyamanan peserta tutur karena adanya pilihan-pilihan yang diberikan kepada peserta tutur selama proses komunikasi. Skala ketidaktegasan sering juga disebut sebagai skala pilihan (*optional scale*). Menurut skala ini, peserta tutur tidak diperkenankan untuk bersikap terlalu tegang serta kaku. Skala kesopanan terakhir dari Lakoff adalah skala kesamaan atau kesekawanan (*equality scale*) yang menunjukkan bahwa agar dapat bersifat sopan peserta tutur haruslah bersikap ramah dan selalu mempertahankan persahabatan atau perrtemuan antar peserta tutur.

Skala kesantunan berikutnya adalah dari Brown dan Levinson. Menurut Brown dan Levinson dalam Rahardi (2005; 68-70), skala kesantunan terdiri dari jarak sosial antara penutur dan lawan tutur, status sosial antara penutur dan lawan tutur serta tindak tutur. Jarak sosial ditentukan oleh perbedaan umur, jenis kelamin, latar belakang sosiokultural dari peserta tutur. Status sosial sering didasarkan pada kedudukan asimetrik antara penutur dan mitra tutur. Sementara itu skala tindak tutur didasarkan atas kedudukan relatif tindak tutur yang satu dengan tindak tutur yang lainnya.

Skala kesantunan yang terakhir dirumuskan oleh Leech. Skala kesantunan dari Leech (1993; 194-200) terdiri dari skala kerugian dan keuntungan (*cost-benefit scale*), skala pilihan (*optionally scale*), skala ketidaklangsungan (*indirectness scale*), skala otoritas (*authority scale*), serta skala jarak sosial (*sosial distance scale*). Skala keuntungan dan kerugian merujuk pada besar kecilnya kerugian dan keuntungan yang diakibatkan oleh sebuah tuturan. Skala pilihan menunjuk kepada banyak sedikitnya pilihan yang disampaikan si penutur kepada lawan tutur. Sementara itu skala ketidaklangsungan ditandai dengan langsung atau tidaknya maksud sebuah tuturan. Berikutnya skala keotoritasan menunjuk kepada hubungan status sosial antara penutur dan lawan tutur yang terlibat dalam penuturan. Skala yang terakhir adalah skala jarak sosial yang menunjuk pada peringkat hubungan sosial antara penutur dan mitra tutur dalam sebuah percakapan.

Penyimpangan Maksim Kesopanan dalam Komunikasi Politik di Indonesia

Beberapa tahun belakangan, Indonesia seolah-olah terbagi dua kubu besar sebagai akibat dari dua peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, yaitu Pemilu Presiden 2014 serta Pilkada Jakarta. Dua peristiwa tersebut memicu terjadinya perang *statements* serta komen dari masing-masing kubu. Sebagian besar komen mereka berisi dengan celaan, pertentangan, serta perdebatan. Jelas semua hal tersebut telah menyimpang dari prinsip kesopanan/kesantunan dalam berbahasa. Bahkan sehubungan dengan dua peristiwa, saat ini banyak bermunculan kata-kata baru seperti *kecebong*, *cebong*, *cebi*, *kampret*, *bani daster*, *bani serbet*, *bani cingkrang*, dan lainnya. Berikut beberapa ulasan penyimpangan yang terjadi dalam postingan di akun sosial media seperti Facebook, Twitter. Penulis akan menggunakan teori kesopanan dari Leech melalui maksim yang ditawarkan.



Postingan di atas muncul dengan adanya rencana dilaksanakannya reuni 212 di Monas. Ada pihak pro maupun kontra dengan acara 212. Pihak yang kontra mengkhawatirkan acara ini akan tidak murni sebagai acara reuni, namun akan diisi kampanye dengan muatan politik menjelang Pilpres 2019. Postingan tersebut dianggap melanggar prinsip kesopanan (maksim kebijaksanaan) karena postingan tersebut seolah-olah menuduh Bawaslu yang tidak berani bertindak tegas jika memang ada muatan politik di acara reuni tersebut. Tuduhan tersebut dianggap merugikan Bawaslu yang bertanggung jawab atas standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi Pengawas Pemilu di setiap tingkatan.



Postingan ini masih terkait dengan acara reuni 212 yang digelar di Monas. Prabowo Subianto, sebagai calon Presiden pada Pilpres 2019 datang pada acara tersebut. Orang yang memposting tulisan di atas menyarankan supaya Bapak Prabowo Subiyanto sebagai calon pimpinan negeri hasil ijtimak ulama untuk dapat mengimami sholat dzuhur di Monas supaya makin banyak orang yang kagum dengan kesalahan beliau. Selama ini masih ada pihak yang meragukan tentang keislaman Prabowo Subiyanto sehingga muncul keinginan untuk melihat Prabowo Subiyanto menjadi imam sholat Dzuhur di Monas. Hal ini dianggap merugikan Prabowo.

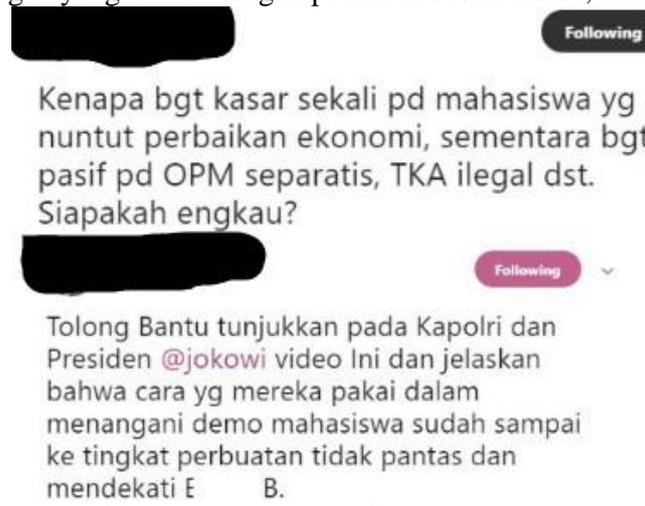


Tulisan pada postingan tersebut jelas telah merugikan Jakarta (warga Jakarta) yang dianggap telah salah dalam memilih pemimpin mereka. Selain itu tulisan itu juga telah merugikan Pemimpin Jakarta (Gubernur) pada saat ini, karena dia seolah-olah dianggap sebagai pilihan yang salah (bukan pilihan warga Jakarta) serta dianggap tidak dapat memimpin warga Jakarta. Hal ini dianggap telah melanggar prinsip kesopanan terutama pada maksim kebijaksanaan.

Penyimpangan Maksim Kedermawanan (Generosity Maxim)

Maksim kedermawanan (Generosity Maxim) menyatakan bahwa dalam proses komunikasi, peserta tutur hendaknya memaksimalkan kerugian bagi diri sendiri serta meminimalkan keuntungan bagi diri sendiri. Hal ini berarti, peserta tutur tidak diperkenankan untuk menyatakan tuturan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri. Jadi ketika peserta tutur dengan sengaja menyatakan suatu ujaran dengan maksud mendapatkan keuntungan untuk dirinya atau kelompoknya,

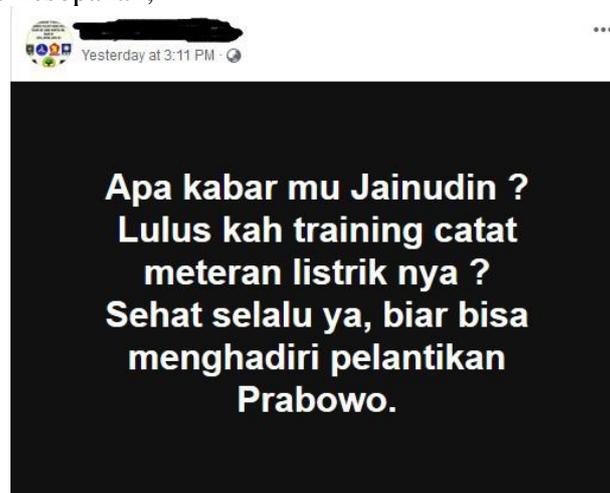
maka peserta tutur tersebut telah melanggar maksim kedermawanan dalam prinsip kesopanan. Berikut contoh postingan yang terkait dengan politik di sosial media;



Postingan ini dituliskan menanggapi pembubaran aksi demo mahasiswa terkait penurunan nilai rupiah terhadap dolar di Gowa Raya, Makasar pada 13 September 2018. Postingan ini membandingkan sikap pemerintah dalam penanganan demo mahasiswa yang begitu aktif dan penuh tekanan dengan penanganan masalah OPM serta TKI Ilegal yang dinilai bersifat pasif. Perbandingan ini memberi kesan bahwa postingan tersebut untuk mencari simpati dari mahasiswa dan hal ini tidak sesuai dengan maksim kedermawanan karena peserta tutur mencari keuntungan untuk diri dan kelompoknya sendiri.

c. Penyimpangan Maksim Kemurahan (Approbation Maxim)

Maksim kemurahan (approbation maxim) mengharapkan setiap peserta tutur untuk memak-simalkan rasa hormat kepada orang lain serta meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain. Dalam maksim ini peserta tutur harus saling menghormati. Setiap peserta tutur tidak boleh mengeluarkan ujaran yang dapat menimbulkan ketidakhormatan kepada orang lain seperti menghina serta mencela. Beberapa postingan di sosial media beberapa tahun terakhir ini sepertinya banyak berisi dengan celaan serta hinaan terhadap pihak-pihak tertentu yang tidak sejalan dengan mereka. Berikut beberapa postingan di sosial media yang dianggap menyimpang dari maksim kemurahan pada prinsip kesopanan;



Postingan di atas ditujukan kepada seseorang yang bernama Jainudin. Nama Jainudin ini sebenarnya ditujukan untuk Presiden Joko Widodo. Nama Jainudin kemungkinan besar muncul setelah Presiden Joko Widodo menyanyikan lagu berbahasa Arab dengan judul Dean Assalam pada saat menghadiri Festival Bintang Vokalis Qosidah di Jakarta pada hari Kamis, 29 November 2018. Salah satu lirik dalam lagu itu berbunyi: Abtahiyyat wabsalam, Ansyuru ahlal kalam

zainuddin yahtirom. Namun sepertinya ada salah lirik pada saat Presiden menyanyikan lagu tersebut beberapa waktu yang lalu. Presiden menyanyikannya dengan lirik Jainudin Nachiro, sehingga hal ini dijadikan bahan cemoohan bagi pihak tertentu yang tidak sejalan. Penggunaan kata Jainudin sebagai panggilan yang dikaitkan dengan kesalahan lirik tersebut dianggap melanggar maksim kemurahan pada prinsip kesopanan.

Yesterday at 4:45 PM

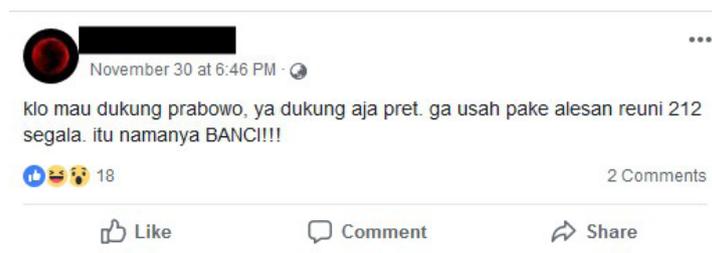
**Ada gubernur rasa presiden,
Imam besar rasa presiden,
capres rasa presiden dan
presiden rasa pelawak.**

Postingan di atas ditujukan kepada seseorang yang bernama Jainudin. Nama Jainudin ini sebenarnya ditujukan untuk Presiden Joko Widodo. Nama Jainudin kemungkinan besar muncul setelah Presiden Joko Widodo menyanyikan lagu berbahasa Arab dengan judul Dean Assalam pada saat menghadiri Festival Bintang Vokalis Qosidah di Jakarta pada hari Kamis, 29 November 2018. Salah satu lirik dalam lagu itu berbunyi: Abtahiyyat wabsalam, Ansyuru ahlal kalam zainuddin yahtirom. Namun sepertinya ada salah lirik pada saat Presiden menyanyikan lagu tersebut beberapa waktu yang lalu. Presiden menyanyikannya dengan lirik Jainudin Nachiro, sehingga hal ini dijadikan bahan cemoohan bagi pihak tertentu yang tidak sejalan. Penggunaan kata Jainudin sebagai panggilan yang dikaitkan dengan kesalahan lirik tersebut dianggap melanggar maksim kemurahan pada prinsip kesopanan.

Yesterday at 4:45 PM

**Ada gubernur rasa presiden,
Imam besar rasa presiden,
capres rasa presiden dan
presiden rasa pelawak.**

Postingan ini membandingkan gubernur, imam besar serta capres yang memiliki rasa seperti presiden dengan seorang presiden yang justru dianggap memiliki rasa seperti pelawak. Presiden disamakan dengan pelawak yang sering jadi bahan tertawaan bagi pihak yang tidak sejalan. Sebagai seorang presiden seharusnya dihormati namun mereka justru menyamakannya dengan seorang pelawak. Dengan postingan ini sebenarnya pemosting tidak hanya menghina Presiden tapi juga menghina profesi pelawak. Secara tidak langsung profesi pelawak dianggap tidak bagus.



Postingan ini dianggap menghina karena penggunaan kata sapaan Pret dan kata Banci. Setelah pilpres 2014 serta pilkada Jakarta banyak bermunculan kata-kata sapaan dari kubu yang berbeda dan ditujukan untuk pihak yang berseberangan. Kata-kata sapaan tersebut diantaranya adalah kampret, pret, kecebong, cebong, bong, bani serbet, dan sebagainya. Kata sapaan Pret (dari kampret) jelas ditujukan untuk pendukung calon presiden Prabowo Subiyanto. Julukan ini diberikan oleh kubu capres yang lain. Kampret berasal dari Bahasa Jawa yang memiliki arti anak kelelawar. Banci adalah sebutan untuk orang laki-laki tapi memiliki sifat seperti sifat perempuan yang lemah gemulai. Penggunaan kata sapaan Pret serta banci jelas merupakan bentuk cemoohan sehingga hal ini dianggap menyimpang dari maksim kemurahan (*approbation maxim*).

Maksim Kerendahan Hati (*Modesty Maxim*)

Maksim kerendahan hati (*modesty maxim*) merupakan jenis maksim yang menekankan bahwa setiap peserta tutur untuk memaksimalkan ketidakhormatan pada diri sendiri serta meminimalkan rasa hormat kepada diri sendiri. Jadi maksim ini menekankan bahwa peserta tutur tidak mengedapankan rasa untuk dihormati. Peserta tutur tidak boleh menyombongkan diri selama proses komunikasi berlangsung.



Postingan ini dianggap menyimpangkan maksim kerendahan hati (*modesty maxim*). Dalam postingan mengandung unsur meninggikan diri sendiri atau kelompok. Hal itu tercermin pada kata Kampret yang diartikan sebagai KAMi PRabowo Elit Terhormat. Kampret merupakan panggilan untuk pendukung Prabowo.



Postingan ini berusaha menunjukkan salah satu prestasi kerja pada saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait pembangunan waduk di Indonesia. Pemosting tulisan membandingkan banyaknya bendungan yang telah dibangun pada masa pemerintahan SBY dengan pada masa pemerintahan Joko Widodo saat ini. Pemosting menunjukkan bahwa pemerintahan SBY membangun 8 kali lipat lebih banyak bendungan daripada pada pemerintahan Joko Widodo. Hal ini dianggap sebagai bentuk memaksimalkan kehormatan untuk diri atau kelompoknya sendiri, yang bertentangan dengan maksim kerendahan hati pada prinsip kesopanan.



@faizalassegaf

Sudah terbukti pak @jokowi tdk punya kemampuan membuat demo berjilid. Maklum, misi politik JKW: Kerja, kerja & kerja. Hasilnya dinikmati ratusan juta rakyat. Jd mau demo ribuan kali pun sia2. Sbb rakyat akan memilih Capres yg kerja nyata, bukan Capres yg doyan bikin demo!

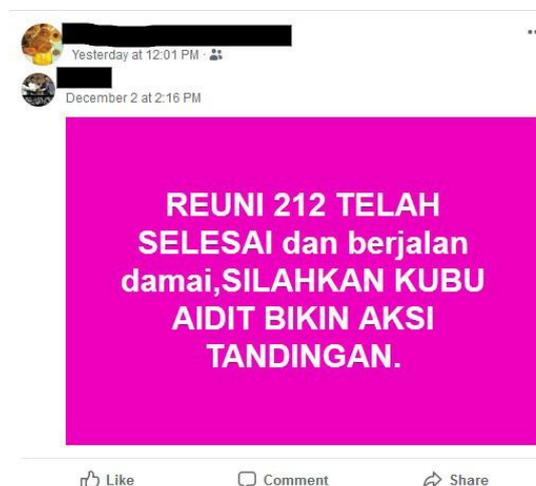
Postingan ini hamper sama dengan postingan sebelumnya, di mana pemosting nampak meninggikan rasa kehormatan dirinya maupun kelompoknya. Pemosting berusaha menunjukkan kelebihan JKW (Joko Widodo) dengan misi politik. Kerja, kerja dan kerja supaya hasilnya dapat dinikmati oleh jutaan rakyat Indonesia. Kelebihan ini dianggap bertentangan dengan capres dari kubu yang lainnya, yang dianggap hanya mampu membuat demo yang berjilid. Hal semacam jelas bertentangan dengan konsep dalam maksim kerendahan hati dalam prinsip kesopanan.

Maksim Persetujuan (Maxim Agreement)

Maksim persetujuan (agreement maxim) berusaha supaya setiap peserta tutur selalu memaksimalkan kecocokan serta meminimalkan ketidakcocokan selama proses komunikasi. Maksim ini berusaha agar peserta tutur tidak menciptakan perbedaan dan pertentangan yang dapat memicu munculnya konflik. Kalaupun ada perbedaan maka perbedaan tersebut harus bersifat parsial serta tidak frontal. Saat peserta tutur lebih mengedankan perbedaan serta ketidakcocokan, maka telah terjadi penyimpangan terkait dengan maksim persetujuan. Banyak postingan di sosial media yang melanggar maksim jenis ini, seperti pada contoh berikut;



Postingan ini ditujukan untuk Kompas, sebuah koran harian yang tua namun terkenal di Indonesia. Koran harian ini berpusat di Jakarta. Kompas dianggap kurang bijak dalam pemberitaan terkait dengan reuni 212 di Monas pada tanggal 2 Desember 2018. Berita terkait Reuni 212 tidak dijadikan berita utama namun hanya ditampilkan di halaman 15 dengan porsi pemberitaan yang kecil. Tindakan ini dianggap sikap yang tidak kredibel dan memberi kesan Kompas berrpihak pada penguasa. Dalam postingan tersebut, penulis menunjukkan sikap yang tidak setuju dengan apa yang telah dilakukan oleh Harian Kompas. Ketidaksetujuan ini sebenarnya sesuatu yang lazim tapi semestinya disampaikan dengan cara yang tidak terlalu frontal seperti menggunakan kata-kata yang vulgar seperti penggunaan kata Media Sampah Partisan. Hal tersebut menunjukkan bahwa postingan tersebut menyimpang dari maksim persetujuan dalam prinsip kesopanan.

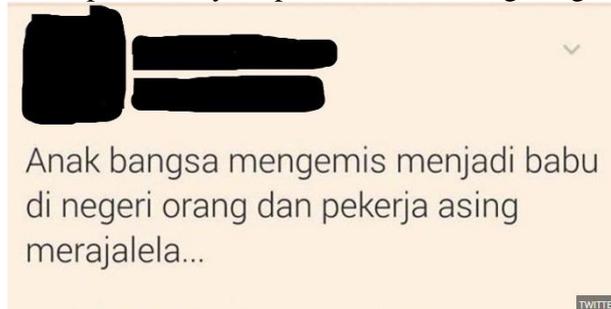


Postingan di atas masih terkait dengan Reuni 212 di Monas beberapa waktu yang lalu. Acara tersebut seperti acara terdahulunya setahun silam berjalan aman, damai dan lancar. Penyimpangan terhadap maksim persetujuan terjadi ketika orang yang memposting tulisan ini menam-

bahkan kalimat yang berkesan menantang pihak yang sejak awal tidak setuju dengan acara reuni tersebut (yang diberi julukan dengan istilah Kubu Aidit) dengan membuat acara tandingan.

Maksim Simpati (Symphyty Maxim)

Maksim Simpati menghendaki supaya semua peserta tutur memaksimalkan rasa simpati dan meminimalkan rasa anti pati selama proses komunikasi berlangsung. Dalam maksim ini penutur sebaiknya bersifat simpati terhadap apa yang dialami oleh mitra tuturnya serta tidak bersikap anti pati. Sikap itu salah satunya dapat ditunjukkan dengan merasa senang dengan kebahagiaan peserta tutur serta merasa sedih dengan kesedihan yang dialami oleh peseret tutur. Jangan samapi peserta tutur bersikap sebaliknya seperti merasa senang dengan kesedihan mitra tutur.



Postingan di atas dinilai tidak menunjukkan simpatinya kepada para Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Tidak dapat dipungkiri bahwa TKI memberikan sumbangan yang besar bagi devisa negara sehingga mereka dianggap sebagai Pahlawan Devisa. TKI pada postingan tersebut dianggap sebagai anak bangsa yang mengemis menjadi babu di negeri orang. Sungguh hal ini sangat tidak menunjukkan rasa simpati dengan para TKI yang berada di luar negeri yang tidak jarang mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Ketidaksimpatian ini jelas bertentangan dengan maksim kesimpatian dalam prinsip kesopanan.



Postingan ini ditulis oleh seorang Wakil Ketua DPR pada hari jadi KPK yang ke 15 pada tahun 2017. Sebagai lembaga yang menangani tentang pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK telah banyak menyelamatkan uang negara dari Operasi Tangkap Tangan (OTT). Bahkan dari tingkat internasional KPK menerima penghargaan Ramon Magsaysay Award pada tahun 2013. Ramon Magsaysay adalah nobel penghargaan yang dibentuk pada bulan April 1957 yang berpusat di New York Amerika Serikat untuk mengenang almarhum Presiden Filipina Ramon Magasaysay. Penghargaan ini didedikasikan untuk menyebarkan keteladanan integritas dalam menjalankan pemerintahan, kegigihan dalam pelayanan umum, serta idealism pragmatisnya dalam suatu lingkungan masyarakat yang demokratis. Hal ini jelas kesuksesan yang diraih KPK atas prestasinya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun dalam postingan tersebut, penulis postingan dengan jelas menunjukkan antipatinya kepada KPK dengan menyatakan ya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun dalam postingan tersebut, penulis postingan dengan jelas menunjukkan antipatinya kepada KPK dengan menanyakan kesuksesan KPK dengan beralasan bahwa semakin banyak OTT itu adalah pengakuan bahwa korupsi juga semakin banyak.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi telah membuat perubahan besar dalam proses komunikasi yang dapat dilaksanakan secara online melalui beberapa social (Facebook, Twitter, Instagram) dengan adanya teknologi internet. Komunikasi secara online memungkinkan seseorang untuk menyampaikan pesan dengan sangat cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hanya dengan mengetik kemudian menekan tombol OK, maka semua informasi yang dibagi akan menyebar ke seluruh penjuru dunia dan dapat diakses oleh siapapun kapanpun maka dari itu masyarakat harus lebih bijak pada saat memunculkan posting di sosial media.

Meskipun cara berkomunikasi semakin modern, kesopanan dalam berbahasa seharusnya tetap selalu hadir selama proses komunikasi. Prinsip kesopanan memang bukan hal yang paling penting dalam berkomunikasi, namun setidaknya peserta tutur tetap harus memperhatikan prinsip kesopanan ini apalagi kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang terkenal dengan kesopanan dan keramahannya. Fenomena hilangnya prinsip kesopanan dalam berkomunikasi di masyarakat Indonesia akhir-akhir ini banyak dijumpai dalam postingan terutama yang terkait dengan isu politik di beberapa sosial media seperti Facebook, Twitter serta Instagram.

Dari hasil pengamatan terhadap beberapa akun social media di Facebook dan Twitter, penulis menemukan 6 jenis maksim prinsip kesopanan yang telah disimpangkan yang meliputi; (1) Penyimpangan maksim kebijaksanaan yang muncul dalam bentuk menuduh, meragukan kemampuan serta menyalahkan orang lain sehingga menimbulkan kerugian bagi peserta tutur, (2) Penyimpangan maksim penerimaan yang ditandai dengan mencari simpati namun dengancara yang tidak selayaknya sehingga menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya (3) Penyimpangan maksim kemurahan terjadi dalam bentuk cemoohan serta hinaan melalui pemberian nama panggilan, menyamakan dengan sesuatu hal yang dianggap kurang bagus (4) Penyimpangan maksim kerendahan hati terjadi dengan menyombongkan diri atau kelompoknya (5) Penyimpangan maksim persetujuan terjadi saat peserta tutur saling bertentangan, saling menantang, saling membandingkan serta (6) Penyimpangan maksim simpati terjadi apabila peserta tutur dengan sengaja menunjukkan antipasti terhadap orang lain dan tidak menghargai keberhasilan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, A. (2010). Kesantunan Berbahasa. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Suryono, Joko. (2010). Norma dan Etika Sopan santun antara Budaya Barat (Amerika) dan Budaya Timur (Indonesia). *Jurnal Widyatama*, 19, 119 – 133, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo
- Leech, G. (1993). Prinsip-Prinsip Pragmatik. Terjemahan M. D. D. Oka. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Nadar, F.X. (2009). Pragmatik & Penelitian Pragmatik. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rahardi, R.K. (2005). Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia. Jakarta: Erlangga.
- Rustono. (1999). Pokok-Pokok Pragmatik. Semarang: IKIP Semarang Press
- Yule. G. (2006). Pragmatik. Terjemahan Indah Fajar Wahyuni dan Rombe Mustajab. Yogyakarta: Pustaka Pelajar